

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pontianak tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut DISTAKA adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis DISTAKA Tahun 2024-2026 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang ekonomi selama 3 (tiga) tahun ke depan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan DISTAKA yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kedudukan renstra perangkat daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis DISTAKA Tahun 2024-2026 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

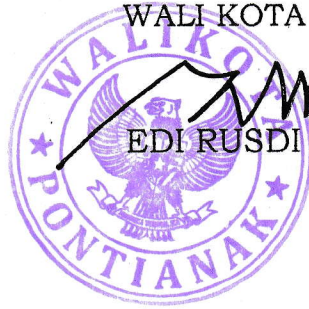
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

WALI KOTA PONTIANAK,



[Handwritten Signature]
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

[Handwritten Signature]
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 11



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR.....TAHUN
TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

Jalan Aliyung No. 7B Pontianak
Telp. 0561-8102060, 08115700460
Fax 0561-764782
Email: disperpusip@pontianak.go.id
Webiste: [http//disperpusip.pontianak.go.id](http://disperpusip.pontianak.go.id)

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Khususnya Urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Kota Pontianak.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur	7
2.2 Sumber Daya	11
2.3 Kinerja Pelayanan	15
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU	
3.1 Permasalahan Pelayanan	43
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	50
4.2 Cascading Kinerja	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	59
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB VIII PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan

awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.
5. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Target Sasaran sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan Nomenklatur Dinas Perpustakaan Kota Pontianak Tipe C menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tipe B sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak).

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kearsipan;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
24. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

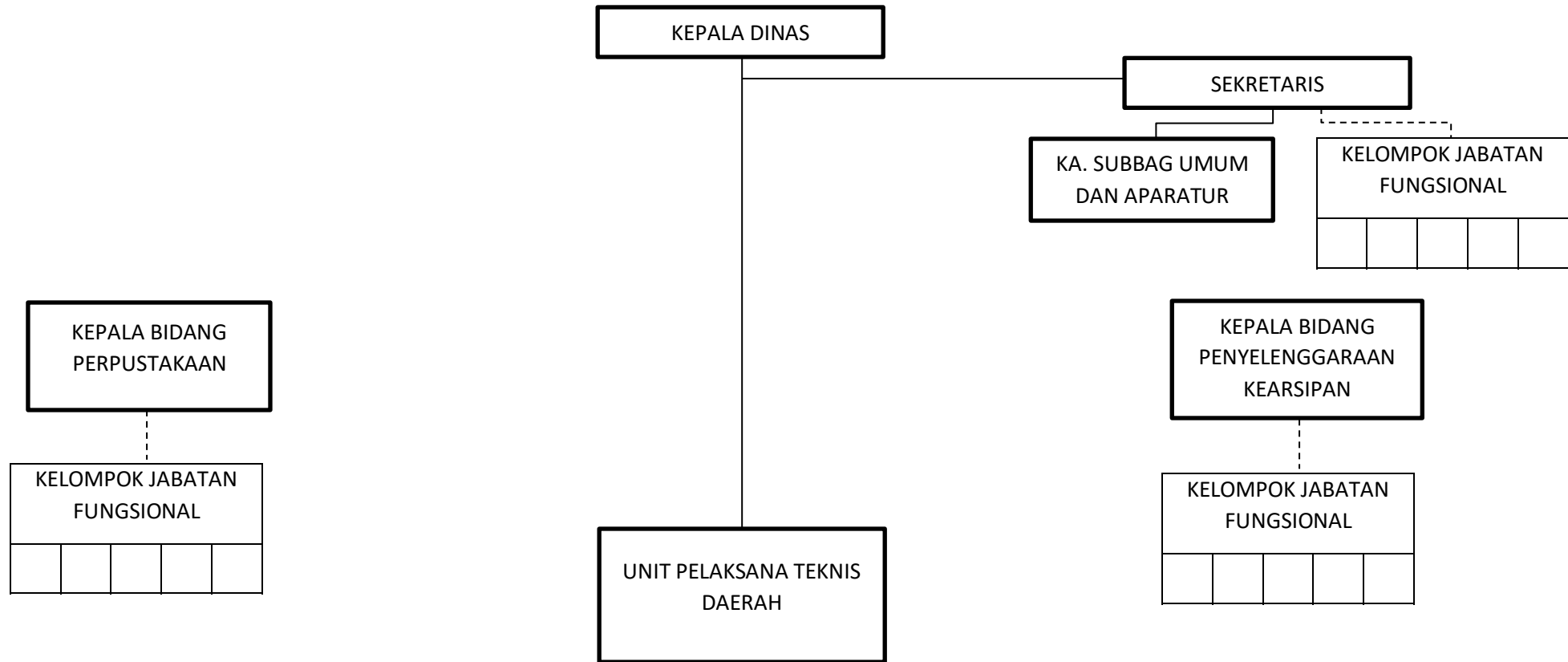
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor : 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, terdiri dari:

1. **Kepala Dinas;**
2. **Sekretaris**, yang membawahi :
 - a. Kepala.Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. **Kepala Bidang Perpustakaan.**
4. **Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan**
5. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Secara lengkap Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PONTIANAK**



Tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022, mempunyai Tugas Pokok, dan Fungsi yaitu sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif, dengan fungsi:
 - Ⓜ Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - Ⓜ Perumusan rencana kerja dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - Ⓜ Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - Ⓜ Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - Ⓜ Penyelenggaraan perizinan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
 - Ⓜ Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan dan kearsipan; dan
 - Ⓜ Pelaksanaan tugas lain dibidang perpustakaan dan kearsipan yang diberikan oleh Walikota.
2. **Sekretaris**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan, dengan fungsi:
 - Ⓜ Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan;
 - Ⓜ Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan
 - Ⓜ Perumusan rencana kerja bidang kesekretariatan
 - Ⓜ Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan
 - Ⓜ Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan
 - Ⓜ Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan
 - Ⓜ Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan
 - Ⓜ Pengelolaan administrasi kesekretariatan dan
 - Ⓜ Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas
 - a. **Kepala Subbagian Umum dan Aparatur**
 - Ⓜ Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
 - Ⓜ Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan Aparatur;
 - Ⓜ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan Aparatur;
 - Ⓜ Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan Aparatur;
 - Ⓜ Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan Aparatur yang diberikan oleh Sekretaris.
3. **Kepala Bidang Perpustakaan**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan

teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan, dengan fungsi sebagai berikut:

- ⊗ Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan;
- ⊗ Perumusan rencana kerja di bidang perpustakaan;
- ⊗ Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan;
- ⊗ Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perpustakaan;
- ⊗ Pengelolaan administrasi dibidang perpustakaan;
- ⊗ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan;
- ⊗ Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perpustakaan; dan
- ⊗ Pelaksanaan tugas lain dibidang perpustakaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. **Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan**, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan fungsi sebagai berikut:

- ⊗ Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan Kearsipan;
- ⊗ Perumusan rencana kerja dibidang penyelenggaraan Kearsipan;
- ⊗ Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan Kearsipan;
- ⊗ Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang penyelenggaraan Kearsipan;
- ⊗ Pengelolaan dibidang penyelenggaraan Kearsipan;
- ⊗ Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan Kearsipan;
- ⊗ Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan Kearsipan;
- ⊗ Pelaksanaan tugas lain dibidang penyelenggaraan Kearsipan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perpustakaan Kota Pontianak terdiri dari jabatan 1 kepala Dinas (pejabat eselon II.B, Gol IV), Sekretaris (pejabat eselon III.A, gol.IV), 2 Kepala Bidang (pejabat eselon III.B, Gol IV dan Gol III), 1 Sub Bagian (pejabat eselon IV.A dan Gol III), 7 Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis (Gol III), 3 Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Kebijakan, 1 Pejabat Fungsional Tertentu Pranata Komputer, 4 Jabatan Fungsional Tertentu Pustakawan (Gol III), 24 Pelaksana. Personil keseluruhan sejumlah 51 orang, terdiri dari PNS 43 orang, honorer (PJLP) 6 orang, dan PJLP cleaning servis 2 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 23 orang, dan perempuan 28 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan IV/c 1 orang, golongan IV/b 1 orang, Golongan IV/a 2 orang, golongan III/d 10 orang, golongan III/c 6 orang, golongan III/b 8 orang, golongan III/a 9 orang, golongan II/d 5 orang, golongan II/c 1 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.1**, sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

TABEL 2.1

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

GOLO-NGAN/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERPUSTAKAAN		BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		JUMLAH		TO-TAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	1	1	-	-	-	1	1	2
II/d	1	-	1	1	-	1	1	2	4
III/a	1	1	1	3	1	-	3	4	7
III/b	2	2	3	-	2	1	7	3	10
III/c	1	-	1	1	-	3	2	4	6
III/d	2	1	3	2	-	2	5	5	10

GOLO-NGAN/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PERPUSTAKAA N		BIDANG PENYELENGG ARAANKEARSI PAN		JUMLAH		TO-TAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/a	-	-	-	1	1	-	1	1	2
IV/b	-	2	-	-	-	-	-	2	2
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH	7	7	10	8	4	7	21	22	43
Total	14		18		11		43		

Sumber: Profil Disperpusip Tahun 2022

TABEL 2.2

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG PERPUSTAKAAN		BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		JMLH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/MA	1	3	6	1	-	2	7	6	13
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	1	-	-	-	1	1
D3	-	1	1	-	1	-	2	1	3
D4	1	-	-	-	1	-	2	-	2
S1	3	2	3	5	1	5	7	13	20
S2	2	1	-	1	1	-	3	2	5
JUMLAH	7	7	10	8	4	7	20	23	43
TOTAL	14		18		11		43		43

Sumber: Profil Disperpusip Tahun 2022

2.2.2. Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

NO. URUT	NAMA /JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
	KIB A			
1				
	KIB B			
1	ELECTRIC GENERATING SET	unit	2	
2	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	unit	2	
3	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	unit	4	
4	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	buah	3	
5	ALAT UKUR/PEMBANDING	buah	7	
6	MESIN KETIK	buah	4	
7	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	buah	236	
8	ALAT KANTOR LAINNYA	buah	25	
9	MEUBELAIR	buah	217	
10	ALAT PEMBERSIH	buah	6	
11	ALAT PENDINGIN	buah	38	
12	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	buah	72	
13	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	buah	4	
14	MEJA KERJA PEJABAT	buah	54	
15	KURSI KERJA PEJABAT	buah	5	
16	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	buah	3	
17	PERALATAN STUDIO AUDIO	unit	7	

18	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	unit	3	
19	PERALATAN CETAK	unit	2	
20	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	unit	3	
21	PERSONAL KOMPUTER	unit	64	
22	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	unit	65	
23	PERALATAN JARINGAN	unit	11	
	KIB C			
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR		7	
	KIB D			
1	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK		1	
	KIB E			
1	BUKU		71.655	
	KIB F			
1				
Jumlah			72.500	

Sumber: Subbag.Umpar. (Juni.2022)

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. *Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan.*

Fungsi utama dan vital dari perpustakaan adalah menarik lebih banyak pengguna perpustakaan, membantu pengguna mencari dan mendayagunakan semua informasi dan sebagai fasilitator perpustakaan dengan kesulitan yang minimal, menginformasikan informasi dan fasilitas baru, membangkitkan minat baca dan belajar, serta menjangkau semua masyarakat.

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi kegiatan pemerintah.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip juga merupakan data atau dokumen dalam bentuk apapun yang memiliki nilai historis, nilai hukum dan nilai kegunaan yang disimpan secara teratur dan sistematis agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat apabila diperlukan oleh suatu lembaga atau organisasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mempunyai dua (2) target indikator kinerja yaitu: **Pertama:** Meningkatkan pembudayaan dan gemar membaca, serta pembinaan perpustakaan; **Kedua:** Meningkatkan pengelolaan arsip daerah Tahun 2020

Capaian Indikator Pertama yaitu Meningkatkan pembudayaan dan gemar membaca serta pembinaan perpustakaan pada tahun 2020 target capaian 55 % realisasi 39,49%. Tahun 2021 target capaian 65 % realisasi 67,76 %, tahun 2022 target capaian 80 % realisasi 249%, sedangkan tahun 2023 target capaian 82 % sedangkan realisasi masih dalam proses berjalan.

Capaian Indikator Kedua yaitu; Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah pada tahun 2020 target capaian CC (Cukup) realisasi BB (Baik) dengan nilai 70,43%, tahun 2021 target capaian B (Baik) realisasi C (Kurang) dengan nilai 46,59%, tahun 2022 target capaian B

(Baik) realisasi C (Kurang) dengan nilai 43,98%, sedangkan tahun 2023 target capaian CC (Cukup) sedangkan realisasinya masih dalam proses berjalan.

Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak lebih lanjut dapat dilihat pada *Tabel II.1*.

Adapun Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Pontianak Nomor 05/Distaka/Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pembuatan kartu tanda anggota (KTA) perpustakaan
2. Pelayanan sirkulasi (peminjaman/ pengembalian buku)
3. Pelayanan pengembalian dan perpanjangan bahan pustaka
4. Pelayanan operasional mobil pintar
5. Pelayanan operasional mobil perpustakaan keliling
6. Pelayanan operasional rumah baca barat Kec. Pontianak Barat
7. Pelayanan operasional rumah baca timur Kec. Pontianak timur
8. Pelayanan operasional rumah baca taman alun Kapuas
9. Pelayanan operasional rumah baca taman digulis
10. Pelayanan operasional rumah baca taman Akcaya
11. Pelayanan operasional perpustakaan digital
12. Pelayanan operasional ruang baca umum
13. Pelayanan operasional perpustakaan umum
14. Pelayanan operasional pesan antar
15. Pelayanan pengaduan

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan		V	V	55.00%	65.00%	80.00%	82.00%	85.00%	39.49%	67.76%	249%	-	-	71.80%	104.25%	293%	-	-
1.1	Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		V	V	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100%			100.00%	100.00%	100%		
1.2	Persentase Kunjungan ke Perpustakaan dan Tempat Baca		V	V		65.00%	80.00%	82.00%	85.00%		64.75%	80%				99,75%	100%		
2.	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah		V	V	CC (cukup)	B (baik)	B (baik)	CC (cukup)	CC (cukup)	BB (70,43%)	C (46,59%)	C (43,98%)	-	-	BB (70,43%)	C (46,59%)	C (43,98%)	-	-
1.1	Indeks Kearsipan		V	V		B (baik)	B (baik)	CC (cukup)	CC (cukup)		B (baik)	B (baik)				100.00%	100%		
1.2	Persentase Arsip Statis dan arsip hasil alih media kabupaten/ kota		V	V		65.00%	70.00%	85.00%	85.00%		0.00%	0%				0.00%	0%		

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No. kode rekening	Uraian T.A. 2020	No. kode rekening	Uraian T.A. 2021	No. kode rekening	Uraian T.A. 2022	No. kode rekening	Uraian T.A. 2023	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
5	BELANJA DAERAH	5	BELANJA DAERAH	5	BELANJA DAERAH	5	BELANJA DAERAH	8,879,637,717	8,234,642,721	8,723,115,536	7,986,716,047		7,924,463,284	7,842,447,223	8,481,605,656				0.95	0.97					
2.17.2.17.01.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,823,501,265	7,636,290,183	7,285,727,236	7,230,727,347		6,869,813,332	7,254,213,054	7,064,614,631			0.88	0.95	0.97				-2.58	1.49
2.17.2.17.01.00.01.001	Gaji dan Tunjangan PNS	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6,796,545,517	13,611,500	15,772,200	15,535,000		5,904,035,929	13,611,500	15,772,200			0.87	1.00	1.00				-28.48	-41.95
511	BELANJA PEGAWAI	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6,796,545,517	8,091,500	9,795,900	9,345,000		5,904,035,929	8,091,500	9,795,900			0.87	1.00	1.00				-27.81	-39.40
51101	Gaji Pokok ASN	5102	Belanja Barang dan Jasa	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3,491,565,517	8,091,500	9,795,900	3,050,000		2,913,909,564	8,091,500	9,795,900			0.83	1.00	1.00				-49.19	-39.33
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	510201	Belanja Barang	510201	Belanja Barang	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	2,480,110,633	8,091,500	9,795,900	3,140,000		2,217,540,994	8,091,500	9,795,900			0.89	1.00	1.00				-48.85	-39.29
5110102	Tunjangan Keluarga	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.23.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	297,363,156	8,091,500	9,795,900	6,152,787,302		223,535,244	8,091,500	9,795,900			0.75	1.00	1.00				20877.87	-37.66
5110103	Tunjangan Jabatan	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	202,195,344	4,291,500	2,646,300	5,977,377,302		118,925,000	4,291,500	2,646,300			0.59	1.00	1.00				75213.52	-67.36
5110104	Tunjangan Fungsional	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	109,234,763	3,800,000	2,646,300	166,920,000		55,339,800	3,800,000	2,646,300			0.51	1.00	1.00				2026.93	-61.75
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	510201	Belanja Barang	2.23.01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	121,648,088	2,270,000	2,646,300	8,490,000		63,985,000	2,270,000	2,646,300			0.53	1.00	1.00				46.42	-39.94
5110106	Tunjangan Beras	5102	Belanja Barang dan Jasa	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.23.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	125,690,489	2,270,000	2,646,300	43,210,000		109,426,620	2,270,000	2,646,300			0.87	1.00	1.00				483.74	-40.67
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	510201	Belanja Barang	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut kelengkapannya	20,000,000	2,270,000	3,330,000	31,210,000		14,601,236	2,270,000	3,330,000			0.73	1.00	1.00				265.09	-18.88
5110108	Pembulatan Gaji	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	40,000	2,270,000	3,330,000	12,000,000		30,630	2,270,000	3,330,000			0.77	1.00	1.00				1960.69	3678.87
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	510201	Belanja Barang			109,676,328	1,185,000	3,330,000			92,218,379	1,185,000	3,330,000			0.84	1.00	1.00				-5.97	41.15

5110121	Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.23.01.206	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	8,618,158	1,085,000	3,330,000	230,735,900		4,576,642	1,085,000	3,330,000		0.53	1.00	1.00		2316.17	65.31
5110122	Jaminan kematian (JKM)	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.206	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	16,988,556	3,250,000	6,047,646,536	11,998,200		13,730,019	3,250,000	5,846,048,673		0.81	1.00	0.97		61933.59	89851.05
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.23.01.206.01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,304,980,000	3,250,000	5,823,756,536	59,724,900		2,990,126,365	3,250,000	5,631,638,673		0.90	1.00	0.97		59631.21	86540.65
5110201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	510201	Belanja Barang	5101	Belanja Pegawai	2.23.01.206.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,296,000,000	3,250,000	5,823,756,536	16,013,700		1,132,484,948	3,250,000	5,631,638,673		0.87	1.00	0.97		59631.01	86540.74
5110205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.23.01.206.04	Penyediaan bahan logistik kantor	1,946,875,000	3,250,000	3,204,112,359	38,280,000		1,796,218,417	3,250,000	3,035,189,522		0.92	1.00	0.95		32763.14	46595.31
5110208	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.23.01.206.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,480,000	1,200,000	2,336,562,789	44,102,100		29,798,000	1,200,000	2,202,900,353		0.98	1.00	0.94		64806.46	91689.53
5110209	Tunjangan Transportasi Kepala OPD/Staf ahli yang tidak menggunakan kendaraan dinas	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.23.01.206.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	31,625,000	2,050,000	248,210,885	11,040,000		31,625,000	2,050,000	230,221,922		1.00	1.00	0.93		3939.59	5518.41
2.17.2.17.01.00.01.004	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	2.23.01.206.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,500,000	6,234,080,885	123,630,000	49,577,000		1,500,000	5,885,212,040	119,060,000		1.00	0.94	0.96		138449.16	196074.75
512	BELANJA BARANG DAN JASA	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.23.01.207	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1,500,000	6,048,528,685	87,740,769	75,150,300		1,500,000	5,699,659,840	84,775,000		1.00	0.94	0.97		134340.78	189889.41
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	5101	Belanja Pegawai	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.23.01.207.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1,500,000	6,048,528,685	57,905,000	75,150,300		1,500,000	5,699,659,840	57,065,000		1.00	0.94	0.99		134355.33	189889.16
5120104	Belanja perangkat, meteran dan benda pos lainnya	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	2.23.01.208	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1,500,000	3,161,108,306	134,854,397	544,601,495		1,500,000	3,008,815,761	129,124,860		1.00	0.95	0.96		70282.89	100196.00
2.17.2.17.01.00.01.005	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.23.01.208.01	Penyediaan jasa surat menyurat	186,738,000	2,256,680,674	11,733,383	1,200,000		128,854,438	2,170,041,510	11,150,384		0.69	0.96	0.95		306.41	742.31
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51010101001	Belanja Gaji Pokok PNS	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.23.01.208.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	186,738,000	2,256,680,674	35,248	175,835,895		128,854,438	2,170,041,510	33,470		0.69	0.96	0.95		166587.34	742.05
51203	Belanja Jasa Kantor	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.23.01.208.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	186,738,000	240,433,508	185,143,348	367,565,600		128,854,438	232,315,048	182,733,322		0.69	0.97	0.99		34.76	29.48
5120301	Belanja telepon	51010102001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.23.01.209	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3,000,000	240,433,508	4,586,611	168,707,350		1,511,227	232,315,048	4,531,265		0.50	0.97	0.99		3798.21	7587.28
5120302	Belanja air	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.23.01.209.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9,000,000	128,900,980	13,709,929	72,750,000		5,475,800	125,270,000	13,593,946		0.61	0.97	0.99		557.84	1049.28
5120303	Belanja listrik	51010103001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.23.01.209.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	126,000,000	128,900,980	2,619,644,177	64,797,350		79,130,656	125,270,000	2,596,449,151		0.63	0.97	0.99		612.36	1015.50

5120306	Belanja kawat/faksimili/internet	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.23.01.209.09.	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	48,738,000	85,272,000	1,045,262,288	31,160,000	42,736,753	79,150,000	1,033,605,278			0.88	0.93	0.99			367.91	645.54
2.17.2.17.01.00.01.008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	57,413,800	85,272,000	1,574,381,889	519,910,700	57,413,800	79,150,000	1,562,843,873			1.00	0.93	0.99			575.95	956.20
511	BELANJA PEGAWAI	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.23.02.01.	PENGLOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	62,198,000	218,640,000	331,584,700	-	58,095,000	209,160,000			#DIV/0!	0.93	0.96			#DIV/0!	#DIV/0!
51108	Honorarium PNS	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5101	Belanja Pegawai	2.23.02.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	-	62,198,000	218,640,000	198,111,100	-	58,095,000	209,160,000			#DIV/0!	0.93	0.96			#DIV/0!	#DIV/0!
5110804	Honorarium Pengelola Kegiatan	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.23.02.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	-	137,670,420	218,640,000	-	-	130,935,360	209,160,000			#DIV/0!	0.95	0.96			#DIV/0!	#DIV/0!
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	51010307	Belanja Honorarium	2.23.02.01.04.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan	57,413,800	137,670,420	218,640,000	-	57,413,800	130,935,360	209,160,000			1.00	0.95	0.96			32.87	93.90
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.23.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.23.02.01.06.	Peningkatan Kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	57,413,800	15,906,081	5,250,000	37,223,600	57,413,800	14,789,953	5,250,000			1.00	0.93	1.00			156.58	-69.37
5120101	Belanja alat tulis kantor	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.02.01.08.	Pengembangan Bahan Pustaka	57,413,800	15,906,081	5,250,000	-	57,413,800	14,789,953	5,250,000			1.00	0.93	1.00			-79.76	-69.37
2.17.2.17.01.00.01.009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	510201	Belanja Barang	2.23.02.01.09.	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	24,220,900	34,048	5,250,000	96,250,000	24,195,900	32,155	5,250,000			1.00	0.94	1.00			5650.96	8063.65
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.23.02.202.	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,220,900	34,048	5,250,000	188,326,000	24,195,900	32,155	5,250,000			1.00	0.94	1.00			6235.57	8063.65
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.23.02.202.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	24,220,900	215,325,084	65,200,000	75,831,000	24,195,900	180,291,032	64,300,000			1.00	0.84	0.99			245.20	290.40
5120601	Belanja cetak	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.23.02.202.03.	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	17,221,000	215,325,084	58,400,000	112,495,000	17,196,000	180,291,032	58,400,000			1.00	0.84	1.00			390.04	440.42
5120602	Belanja Penggandaan	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5101	Belanja Pegawai	2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	6,999,900	4,681,838	500,000	220,745,600	6,999,900	4,473,891	500,000			1.00	0.96	1.00			14642.23	-62.46
2.17.2.17.01.00.01.010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.24.02.201.	PENGLOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,153,600	4,681,838	500,000	154,133,200	6,153,600	4,473,891	500,000			1.00	0.96	1.00			10204.47	-58.06
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	51010307	Belanja Honorarium	2.24.02.201.01.	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	6,153,600	14,005,673	500,000	89,588,200	6,153,600	13,421,810	500,000			1.00	0.96	1.00			5949.60	10.92
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.24.02.201.02.	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	6,153,600	14,005,673	57,900,000	2,850,500	6,153,600	13,421,810	57,900,000			1.00	0.96	1.00			115.31	224.75
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	510201	Belanja Barang	2.24.02.201.03.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6,153,600	2,887,420,379	57,900,000	61,694,500	6,153,600	2,690,844,079	57,900,000			1.00	0.93	1.00			15577.01	21765.06
2.17.2.17.01.00.01.011	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.24.03.202.	PENGLOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,889,723	1,144,835,842	57,900,000	62,472,400	11,855,000	1,059,082,967	57,900,000			1.00	0.93	1.00			3147.25	4369.55

512	BELANJA BARANG DAN JASA	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.24.03.202.02	Akuisisi, pengelolaan preventi dan akses arsip statis	11,889,723	1,144,835,842	6,800,000	62,472,400	11,855,000	1,059,082,967	5,900,000	1.00	0.93	0.87	3416.03	4367.10
51203	Belanja Jasa Kantor	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.24.03.203	PENGLOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	11,889,723	1,742,584,537	6,800,000	4,140,000	11,855,000	1,631,761,112	5,900,000	1.00	0.94	0.87	4805.83	6782.34
5120305	Belanja surat kabar/majalah	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	510202	Belanja Jasa	2.24.03.203.01	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	11,889,723	1,742,584,537	6,800,000	4,140,000	11,855,000	1,631,761,112	5,900,000	1.00	0.94	0.87	4805.83	6782.34
2.17.2.17.01.00.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	19,160,000	177,580,000	6,800,000	15,332,400	19,140,000	177,580,000	5,900,000	1.00	1.00	0.87	285.38	365.56
512	BELANJA BARANG DAN JASA	5101	Belanja Pegawai	510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.24.03.201	PEMUSNAHAN ARSIP DILINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	19,160,000	177,580,000	-	10,450,000	19,140,000	177,580,000	-	1.00	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	363.90
51211	Belanja Makanan dan Minuman	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.24.03.201.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	19,160,000	177,580,000	-	5,650,000	19,140,000	177,580,000	-	1.00	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	363.90
5121101	Belanja makanan dan minuman rapat	51010307	Belanja Honorarium	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.24.03.201.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	15,000,000	177,580,000	258,963,600	4,800,000	14,980,000	177,580,000	255,181,284	1.00	1.00	0.99	343.85	564.57
5121102	Belanja makanan dan minuman tamu	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.24.03.203	PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	4,160,000	177,580,000	9,665,300	-	4,160,000	177,580,000	9,665,300	1.00	1.00	1.00	1324.73	2037.10
2.17.2.17.01.00.01.014	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	2.23.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.24.03.203.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	374,267,200	7,972,200	9,665,300	-	373,554,155	7,972,200	9,665,300	1.00	1.00	1.00	-58.88	-38.31
511	BELANJA PEGAWAI	5102	Belanja Barang dan Jasa	510201	Belanja Barang	2.24.03.203.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	7,972,200	9,665,300	-	-	7,972,200	9,665,300	1.00	1.00	-	-	-
51108	Honorarium PNS	510201	Belanja Barang	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.24.03.204	AUTENTIFIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL AHLI MEDIA KABUPATEN/KOTA	-	7,972,200	9,665,300	4,882,400	-	7,972,200	9,665,300	1.00	1.00	-	-	-
5110804	Honorarium Pengelola Kegiatan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.24.03.204.02	Penilaian dan penetapan hasil ahli media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	-	7,972,200	67,999,000	4,882,400	-	7,972,200	67,999,000	1.00	1.00	-	-	-
5110806	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5102	Belanja Barang dan Jasa	-	-	7,972,200	67,999,000	-	-	7,972,200	67,999,000	1.00	1.00	-	-	-	
51110	Uang Lembur	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	510201	Belanja Barang	-	-	-	67,999,000	-	-	-	67,999,000	-	1.00	-	-	-	-
5111001	Uang Lembur PNS	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	32,910,000	67,999,000	-	-	32,910,000	67,999,000	1.00	1.00	-	-	-	
512	BELANJA BARANG DAN JASA	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	374,267,200	32,910,000	14,066,500	-	373,554,155	32,910,000	14,066,500	1.00	1.00	1.00	-82.82	-74.22
51203	Belanja Jasa Kantor	5101	Belanja Pegawai	5102	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	1,510,000	14,066,500	-	-	1,510,000	14,066,500	1.00	1.00	-	-	-

5120312	Belanja Dekorasi	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	510201	Belanja Barang		1,510,000	14,066,500			1,510,000	14,066,500			1.00	1.00					
5120315	Belanja kerjasama dengan mess media	51010307	Belanja Honorarium	51020101	Belanja Barang Pakai Habis		1,510,000	14,066,500			1,510,000	14,066,500			1.00	1.00					
51204	Belanja Premi Asuransi	51010307002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,315,200	1,510,000	29,040,000		15,874,155	1,510,000	29,040,000			0.97	1.00	1.00		544.14	866.35	
5120401	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5102	Belanja Barang dan Jasa	5102	Belanja Barang dan Jasa	7,920,000	31,400,000	29,040,000		7,920,000	31,400,000	29,040,000			1.00	1.00	1.00		62.98	144.47	
5120403	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	510201	Belanja Barang	510201	Belanja Barang	8,395,200	31,400,000	29,040,000		7,954,155	31,400,000	29,040,000			0.95	1.00	1.00		55.50	143.62	
51211	Belanja Makanan dan Minuman	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	71,172,000	31,400,000	29,040,000		71,136,000	31,400,000	29,040,000			1.00	1.00	1.00		-54.47	-31.69	
5121105	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	51020101063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71,172,000	27,000,000	45,547,800		71,136,000	27,000,000	45,547,800			1.00	1.00	1.00		-31.12	3.33	
5122	Belanja Jasa Non ASN	51020101064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5102	Belanja Barang dan Jasa	286,780,000	4,400,000	45,547,800		286,544,000	4,400,000	45,547,800			1.00	1.00	1.00		245.57	418.36	
5122701	Uang Lembur Non PNS	2.23.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	510201	Belanja Barang	72,280,000		45,547,800		72,044,000		45,547,800			1.00		1.00				
5122724	Belanja jasa supir / pengemudi	5102	Belanja Barang dan Jasa	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35,750,000		45,547,800		35,750,000		45,547,800			1.00		1.00				
5122730	Belanja Jasa Petugas Administrasi	510202	Belanja Jasa	2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	178,750,000		18,620,000		178,750,000		18,620,000			1.00		1.00				
2.17.2.17.01.00.01.018	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5102	Belanja Barang dan Jasa	216,600,000		18,620,000		214,245,000		18,620,000			0.99		1.00				
511	BELANJA PEGAWAI	51020212001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	510202	Belanja Jasa	216,600,000		18,620,000		214,245,000		18,620,000			0.99		1.00				
51101	Honorarium PNS	510204	Belana Perjalanan Dinas	51020201	Belanja Jasa Kantor	216,600,000		18,620,000		214,245,000		18,620,000			0.99		1.00				
5110103	Honorarium Pengelola Keuangan	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,600,000		74,025,000		214,245,000		70,242,784			0.99		0.95				
5110104	Honorarium Pengelola Kegiatan	51020401001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5102	Belanja Barang dan Jasa			74,025,000				70,242,784					0.95				
5110105	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510204	Belana Perjalanan Dinas		171,809,819	74,025,000			170,243,575	70,242,784				0.99	0.95				
2.17.2.17.01.00.01.354	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27,715,600	12,639,376	74,025,000		27,715,600	12,639,376	70,242,784			1.00	1.00	0.95		110.42	200.67	
512	BELANJA BARANG DAN JASA	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,715,600	12,639,376	48,599,200		27,715,600	12,639,376	48,549,200			1.00	1.00	1.00		43.37	114.86	
51215	Belanja Perjalanan Dinas	510201	Belanja Barang	2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,715,600	12,639,376	48,599,200		27,715,600	12,639,376	48,549,200			1.00	1.00	1.00		43.37	114.86	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5101	Belanja Pegawai		12,639,376	500,000			12,639,376	500,000				1.00	1.00				
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51020101031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27,715,600	12,639,376	500,000		27,715,600	12,639,376	500,000			1.00	1.00	1.00		-83.48	-75.22	

2.17.2.17.01.00.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5102	Belanja Barang dan Jasa	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10,043,000	49,153,275	2,550,000	10,043,000	49,153,275	2,549,350			1.00	1.00	1.00			64.87	147.31
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510201	Belanja Barang	510202	Belanja Jasa	10,043,000	49,153,275	-	10,043,000	49,153,275	-			1.00	1.00					144.71
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51020201	Belanja Jasa Kantor	388,000	49,153,275	-	388,000	49,153,275	-			1.00	1.00					6234.18
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51020101024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388,000	3,038,250	521,475,600	388,000	3,038,250	519,997,600			1.00	1.00	1.00			5882.25	8849.05
5120107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5102	Belanja Barang dan Jasa	-	46,115,025	521,475,600	-	46,115,025	519,997,600					1.00	1.00			
51218	Belanja Pemeliharaan	2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	510201	Belanja Barang	9,655,000	10,255,000	57,722,000	9,655,000	10,255,000	57,722,000			1.00	1.00	1.00			123.03	234.54
5121802	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5102	Belanja Barang dan Jasa	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9,655,000	10,255,000	57,722,000	9,655,000	10,255,000	57,722,000			1.00	1.00	1.00			123.03	234.54
2.17.2.17.01.00.02.048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	510202	Belanja Jasa	510202	Belanja Jasa	88,238,200	10,255,000	463,753,600	88,238,200	10,255,000	462,275,600			1.00	1.00	1.00			1411.28	2159.71
522	BELANJA MODAL	51020201	Belanja Jasa Kantor	51020201	Belanja Jasa Kantor	88,238,200	10,255,000	442,000,000	88,238,200	10,255,000	440,522,000			1.00	1.00	1.00			1340.57	2053.65
52211	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	51020201062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7,840,000	10,255,000	21,753,600	7,840,000	10,255,000	21,753,600			1.00	1.00	1.00			14.31	71.47
5221109	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	2.23.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,840,000	-	150,622,000	7,840,000	-	150,207,550			1.00		1.00				
52214	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,472,200	-	73,672,000	42,472,200	-	73,653,150			1.00		1.00				
5221404	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	510201	Belanja Barang	5102	Belanja Barang dan Jasa	42,472,200	-	73,672,000	42,472,200	-	73,653,150			1.00		1.00				
5221405	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	510203	Belanja Pemeliharaan	-	-	73,672,000	-	-	73,653,150					1.00				
52215	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51020101053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,335,000	-	73,672,000	21,335,000	-	73,653,150			1.00		1.00				
5221501	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,160,000	10,015,144	76,950,000	11,160,000	8,448,900	76,554,400			1.00	0.84	0.99			186.03	390.90
5221506	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5102	Belanja Barang dan Jasa	5102	Belanja Barang dan Jasa	10,175,000	10,015,144	76,950,000	10,175,000	8,448,900	76,554,400			1.00	0.84	0.99			188.92	394.56
52216	Belanja modal Pengadaan Komputer	510204	Belanja Perjalanan Dinas	510201	Belanja Barang	11,401,000	10,015,144	4,710,000	11,401,000	8,448,900	4,685,900			1.00	0.84	0.99			-55.04	-35.22
5221604	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11,401,000	10,015,144	4,710,000	11,401,000	8,448,900	4,685,900			1.00	0.84	0.99			-55.04	-35.22

5221606	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	510203	Belanja Pemeliharaan		10,015,144	72,240,000			8,448,900	71,868,500					0.84	0.99		
52217	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,200,000	166,692,700	72,240,000		3,200,000	166,692,700	71,868,500		1.00	1.00	0.99			1650.83	2526.13
5221703	Belanja modal pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,200,000	166,692,700			3,200,000	166,692,700			1.00	1.00					2504.57
52218	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5101	Belanja Pegawai	5101	Belanja Pegawai	1,990,000	4,530,000			1,990,000	4,530,000			1.00	1.00					13.82
5221801	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,990,000	4,530,000			1,990,000	4,530,000			1.00	1.00					13.82
2.17.2.17.01.00.04	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	51010307	Belanja Honorarium	51010307	Belanja Honorarium	47,596,427	4,530,000			47,596,427	4,530,000			1.00	1.00					-95.24
2.17.2.17.01.00.04.003	Pendidikan dan Pelatihan Formal	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5102	Belanja Barang dan Jasa	47,596,427	4,530,000			47,596,427	4,530,000			1.00	1.00					-95.24
512	BELANJA BARANG DAN JASA	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	510202	Belanja Jasa	47,596,427	162,162,700			47,596,427	162,162,700			1.00	1.00					70.35
51215	Belanja Perjalanan Dinas	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51020201	Belanja Jasa Kantor	39,846,427	65,000,200			39,846,427	65,000,200			1.00	1.00					-18.44
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	510203	Belanja Pemeliharaan	39,846,427	59,011,000			39,846,427	59,011,000			1.00	1.00					-25.95
51223	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,750,000	56,511,000			7,750,000	56,511,000			1.00	1.00					264.59
5122301	Belanja kursus-kursus / pelatihan / non gelar	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7,750,000	2,500,000	1,239,999,100		7,750,000	2,500,000	1,221,251,925		1.00	1.00	0.98			16444.07	24341.17
2.17.2.17.01.00.06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,900,000	5,989,200	1,026,707,800		2,900,000	5,989,200	1,007,960,625		1.00	1.00	0.98			5683.06	8418.08
2.17.2.17.01.00.06.001	Penyusunan Rencana kerja	520205020001	Belanja Modal Mebel	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,300,000	5,989,200	244,552,700		1,300,000	5,989,200	244,051,450		1.00	1.00	1.00			1414.65	2167.78
511	BELANJA PEGAWAI	520210	Belanja Modal Komputer	5101	Belanja Pegawai		97,162,500	3,020,000			97,162,500	3,020,000			1.00	1.00				
51108	Honorarium PNS	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		97,162,500	3,020,000			97,162,500	3,020,000			1.00	1.00				
5110801	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	51010307	Belanja Honorarium		86,242,500	3,020,000			86,242,500	3,020,000			1.00	1.00				
512	BELANJA BARANG DAN JASA	520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5102	Belanja Barang dan Jasa	1,300,000	10,920,000	143,042,700		1,300,000	10,920,000	142,691,450		1.00	1.00	1.00			616.64	973.35
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510201	Belanja Barang	800,000	739,188,695	138,242,700		800,000	708,110,087	137,891,450		1.00	0.96	1.00			30705.76	44166.62
5120601	Belanja cetak	2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	200,000	4,080,000	138,242,700		200,000	4,080,000	137,891,450		1.00	1.00	1.00			1709.43	2609.85
5120602	Belanja Penggandaan	5102	Belanja Barang dan Jasa	510202	Belanja Jasa	600,000	4,080,000	4,800,000		600,000	4,080,000	4,800,000		1.00	1.00	1.00			165.88	298.82

51211	Belanja Makanan dan Minuman	510201	Belanja Barang	51020201	Belanja Jasa Kantor	500,000	4,080,000	4,800,000	500,000	4,080,000	4,800,000	1.00	1.00	1.00	211.22	366.82
5121105	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500,000	4,080,000	98,490,000	500,000	4,080,000	98,340,000	1.00	1.00	1.00	976.66	1513.15
2.17.2.17.01.00.06.004	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	51020101027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	1,600,000	4,080,000	98,490,000	1,600,000	4,080,000	98,340,000	1.00	1.00	1.00	789.66	1232.65
511	BELANJA PEGAWAI	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	153,430,095	98,490,000	-	137,624,199	98,340,000	0.90	1.00			
51108	Honorarium PNS	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	153,430,095	94,699,900	-	137,624,199	94,699,900	0.90	1.00			
5110801	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	510202	Belanja Jasa	5102	Belanja Barang dan Jasa	-	153,430,095	94,699,900	-	137,624,199	94,699,900	0.90	1.00			
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020201	Belanja Jasa Kantor	510201	Belanja Barang	1,600,000	153,430,095	49,399,900	1,600,000	137,624,199	49,399,900	1.00	0.90	1.00	3107.19	4218.70
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020201060	Belanja Tagihan Air	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1,100,000	6,000,000	49,399,900	1,100,000	5,990,800	49,399,900	1.00	1.00	1.00	356.26	584.61
5120601	Belanja cetak	51020201061	Belanja Tagihan Listrik	510202	Belanja Jasa	200,000	96,541,095	33,300,000	200,000	83,714,167	33,300,000	1.00	0.87	1.00	16001.68	20848.43
5120602	Belanja Penggandaan	51020201063	Belanja Kawat Faksimili/Internet TV Berlangganan	51020201	Belanja Jasa Kantor	900,000	50,889,000	26,600,000	900,000	47,919,232	26,600,000	1.00	0.94	1.00	1802.20	2589.93
51211	Belanja Makanan dan Minuman	2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	500,000	1,704,000	6,700,000	500,000	1,677,900	6,700,000	1.00	0.98	1.00	144.66	267.44
5121105	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5102	Belanja Barang dan Jasa	510204	Belana Perjalanan Dinas	500,000	1,704,000	12,000,000	500,000	1,677,900	12,000,000	1.00	0.98	1.00	248.34	425.38
2.17.2.17.01.00.08	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR	510201	Belanja Barang	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	1,704,000	12,000,000	-	1,677,900	12,000,000	0.98	1.00			
2.17.2.17.01.00.014	Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Perlengkapannya	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	-	1,704,000	687,455,200	-	1,677,900	669,209,275	0.98	0.97			
511	BELANJA PEGAWAI	51020101024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5101	Belanja Pegawai	-	1,704,000	5,820,000	-	1,677,900	4,610,000	0.98	0.79			
51108	Honorarium PNS	510202	Belanja Jasa	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	5,820,000	-	-	4,610,000	0.79				
5110802	Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	51020201	Belanja Jasa Kantor	51010307	Belanja Honorarium	-	-	5,820,000	-	-	4,610,000	0.79				
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020201029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5102	Belanja Barang dan Jasa	-	-	221,442,200	-	-	217,959,100	0.98				
51212	Belanja Pakain Dinas dan Atributnya	51020201055	Belanja Jasa Bklan/Reklame, Film, dan Pematretan	510201	Belanja Barang	-	-	32,797,200	-	-	29,317,200	0.89				
5121204	Belanja Pakain Dinas Harian (PDH)	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	-	579,974,600	32,797,200	-	564,727,988	29,317,200	0.97	0.89			
51213	Belanja Pakain Kerja	5102	Belanja Barang dan Jasa	510202	Belanja Jasa	-	579,974,600	188,645,000	-	564,727,988	188,641,900	0.97	1.00			
5121304	Belanja Pakain Office Boy	510201	Belanja Barang	51020207	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	153,330,000	150,000,000	-	152,741,000	149,996,900	1.00	1.00			
51214	Belanja Pakain khusus dan hari-hari tertentu	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51020209	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	-	153,330,000	38,645,000	-	152,741,000	38,645,000	1.00	1.00			
5121403	Belanja pakain batik tradisional	51020101054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	153,330,000	281,459,000	-	152,741,000	268,197,900	1.00	0.95			

2.17.2.17.01.00.08	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN	510202	Belanja Jasa	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		1,150,000	426,644,600	19,716,000		1,150,000	411,986,988	19,176,000			1.00	0.97	0.97			12268.05	17814.80	
2.17.2.17.01.00.001	Penyusunan Laporan Keuangan	51020201	Belanja Jasa Kantor	52020501	Belanja Modal Alat Kantor		1,150,000	404,891,000	19,716,000		1,150,000	390,351,000	19,176,000			1.00	0.96	0.97			11637.59	16874.24	
511	BELANJA PEGAWAI	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				6,720,000				6,720,000					1.00					
51108	Honorarium PNS	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52020601	Belanja Modal Alat Studio			178,750,000	6,720,000			178,750,000	6,720,000					1.00	1.00				
5110801	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	520210	Belanja Modal Komputer			71,500,000	255,023,000			71,500,000	242,301,900					1.00	0.95				
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52021001	Belanja Modal Komputer Unit		1,150,000		103,399,000		1,150,000		102,675,000					1.00	0.99				
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Surir	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer		650,000	35,750,000	151,624,000		650,000	35,750,000	139,626,900					1.00	1.00	0.92		1874.71	2845.28
5120601	Belanja cetak	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		200,000	13,600,000	178,734,000		200,000	13,600,000	178,442,275					1.00	1.00	1.00		2604.74	3956.04
5120602	Belanja Penggandaan	510202010071	Belanja Lembur	520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		450,000	105,291,000	178,734,000		450,000	90,751,000	178,442,275					1.00	0.86	1.00		7755.92	10081.76
51211	Belanja Makanan dan Minuman	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak		500,000	21,753,600	178,734,000		500,000	21,635,988	178,442,275					1.00	0.99	1.00		1624.12	2475.97
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		500,000	10,560,000	213,291,300		500,000	10,560,000	213,291,300					1.00	1.00	1.00		1277.27	1965.90
2.17.2.17.01.00.09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			633,600	146,095,400			581,328	146,095,400					0.92	1.00				
2.17.2.17.01.00.09	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5102	Belanja Barang dan Jasa			10,560,000	146,095,400			10,494,660	146,095,400					0.99	1.00				
511	BELANJA PEGAWAI	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510201	Belanja Barang			277,996,584	80,183,400			277,433,152	80,183,400					1.00	1.00				
51108	Honorarium PNS	2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis			58,440,000	80,183,400			58,424,694	80,183,400					1.00	1.00				
5110801	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan	5102	Belanja Barang dan Jasa	510202	Belanja Jasa			58,440,000	51,162,000			58,424,694	51,162,000					1.00	1.00				
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510203	Belanja Pemeliharaan	51020201	Belanja Jasa Kantor			58,440,000	17,100,000			58,424,694	17,100,000					1.00	1.00				
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			58,440,000	34,062,000			58,424,694	34,062,000					1.00	1.00				

5120601	Belanja cetak	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53,600,000	-	-	53,597,306	-	-	1.00	-	-	-	-	-
5120602	Belanja Penggandaan	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,840,000	14,750,000	-	4,827,388	14,750,000	#DIV/0!	1.00	1.00	-	-	-	-
2.17.2.17.01.00.16	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	2.23.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	598,380,325	63,360,000	14,750,000	598,245,025	63,205,117	1.00	1.00	1.00	-	-	-88.71	-83.05
2.17.2.17.01.00.16	Pengadaan Buku/Bahan Pustaka	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	530,500,325	63,360,000	67,195,900	530,500,325	63,205,117	1.00	1.00	1.00	-	-	-60.67	-40.89
521	BELANJA PEGAWAI	510201	Belanja Barang	5102	Belanja Barang dan Jasa	3,750,000	4,650,000	67,195,900	3,750,000	4,644,117	1.00	1.00	1.00	-	-	423.02	685.37
51109	Honorarium Non PNS	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	510201	Belanja Barang	3,750,000	4,650,000	24,619,900	3,750,000	4,644,117	1.00	1.00	1.00	-	-	117.82	226.99
5110902	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan non ASN	51020101004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3,750,000	3,000,000	24,619,900	3,750,000	2,994,117	1.00	1.00	1.00	-	-	200.22	351.06
525	BELANJA MODAL	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	510202	Belanja Jasa	526,750,325	1,650,000	24,576,000	526,750,325	1,650,000	1.00	1.00	1.00	-	-	396.59	644.88
52501	Belanja modal Pengadaan Buku	510203	Belanja Pemeliharaan	51020201	Belanja Jasa Kantor	526,750,325	58,710,000	15,000,000	526,750,325	58,561,000	1.00	1.00	1.00	-	-	-87.77	-81.63
5250101	Belanja modal Pengadaan Buku Umum	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64,035,250	58,710,000	9,576,000	64,035,250	58,561,000	1.00	1.00	1.00	-	-	-64.00	-46.10
5250103	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	510204	Belanja Perjalanan Dinas	86,651,675	10,752,000	-	86,651,675	10,735,000	1.00	1.00	-	-	-	-	-93.81
5250104	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89,670,250	10,708,000	-	89,670,250	10,660,000	1.00	1.00	-	-	-	-	-94.06
5250106	Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90,663,825	15,150,000	18,000,000	90,663,825	15,148,000	1.00	1.00	1.00	-	-	-54.83	-32.23
5250107	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54,872,200	14,400,000	18,000,000	54,872,200	14,320,000	1.00	0.99	1.00	-	-	-49.59	-24.10
5250108	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	50,956,375	7,700,000	197,389,200	50,956,375	7,698,000	1.00	1.00	0.99	-	-	759.54	1178.92
5250109	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	2.23.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	89,900,750	156,196,584	95,679,200	89,900,750	155,803,341	1.00	1.00	0.99	-	-	-21.67	16.91
2.17.2.17.01.00.16.002	Pengolahan Dan Entry Data Bahan Pustaka	5101	Belanja Pegawai	2.24.02.2.0101	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	-	6,180,000	95,679,200	-	6,180,000	1.00	0.99	-	-	-	-	-
511	BELANJA PEGAWAI	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	5102	Belanja Barang dan Jasa	-	6,180,000	95,679,200	-	6,180,000	1.00	0.99	-	-	-	-	-
51108	Honorarium PNS	51010307	Belanja Honorarium	510201	Belanja Barang	-	6,180,000	24,603,200	-	6,180,000	1.00	1.00	-	-	-	-	-

5110806	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	51020101	Belanja Barang Pakai Habis		6,180,000	24,603,200			6,180,000	24,603,200			1.00	1.00				
512	BELANJA BARANG DAN JASA	5102	Belanja Barang dan Jasa	510202	Belanja Jasa		150,016,584	34,275,000			149,623,341	34,275,000			1.00	1.00				
51219	Belanja Jasa Konsultansi	510203	Belanja Pemeliharaan	51020201	Belanja Jasa Kantor		150,016,584	34,275,000			149,623,341	34,275,000			1.00	1.00				
5121904	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Komputerisasi	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		150,016,584				149,623,341				1.00					
2.17.2.17.01.00.16.003	Peningkatan Layanan Taman Bacaan	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30,900,000	150,016,584			30,764,700	149,623,341				1.00	1.00			143.17	
511	BELANJA PEGAWAI	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	510204	Belanja Perjalanan Dinas	30,900,000	497,082,738	36,801,000		30,764,700	487,442,745	35,394,500			1.00	0.98	0.96		438.70	695.84
51108	Honorarium PNS	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30,900,000	335,881,918	36,801,000		30,764,700	330,847,520	35,394,500			1.00	0.99	0.96		265.98	443.06
5110806	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	900,000	34,697,020			900,000	34,675,420				1.00	1.00				1826.41
5120209	Belanja Perlengkapan Pengolahan Bahan Pustaka / Buku	5101	Belanja Pegawai	5102	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000				29,864,700					1.00					
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	510201	Belanja Barang															
51202	Belanja Bahan/Material	51010307	Belanja Honorarium	51020101	Belanja Barang Pakai Habis															
5120209	Belanja Perlengkapan Pengolahan Bahan Pustaka/Buku	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			101,710,000				101,466,400				1.00				
2.17.2.17.01.00.16.004	Stock Opname Koleksi Perpustakaan	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	26,630,000	34,697,020	101,710,000		26,630,000	34,675,420	101,466,400			1.00	1.00	1.00		41.14	111.41
521	BELANJA PEGAWAI	510201	Belanja Barang	5101	Belanja Pegawai	4,200,000	26,297,020	1,710,000		4,200,000	26,275,420	1,710,000			1.00	1.00	1.00		110.87	216.06
51109	Honorarium Non PNS	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4,200,000	26,297,020	1,710,000		4,200,000	26,275,420	1,710,000			1.00	1.00	1.00		110.87	216.06
5110902	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan non ASN	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51010307	Belanja Honorarium	4,200,000	3,501,070	1,710,000		4,200,000	3,479,470	1,710,000			1.00	0.99	1.00		-55.93	-34.01
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5102	Belanja Barang dan Jasa	22,430,000	4,510,950	100,000,000		22,430,000	4,510,950	99,756,400			1.00	1.00	1.00		645.65	1015.77
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	510201	Belanja Barang	1,500,000				1,500,000					1.00					
5120602	Belanja Penggandaan	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Larangan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1,500,000	18,285,000			1,500,000	18,285,000				1.00	1.00				509.50
51211	Belanja Makanan dan Minuman	510202	Belanja Jasa	510202	Belanja Jasa	20,930,000	8,400,000	100,000,000		20,930,000	8,400,000	99,756,400			1.00	1.00	1.00		310.20	513.85
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51020201	Belanja Jasa Kantor	51020201	Belanja Jasa Kantor	20,930,000	8,400,000	100,000,000		20,930,000	8,400,000	99,756,400			1.00	1.00	1.00		310.20	513.85

2.17.2.17.01.00.16.005	Peningkatan Layanan Perpustakaan	51020201004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		2,550,000	3,600,000				2,550,000	3,600,000				1.00	1.00				-29.41	
521	BELANJA PEGAWAI	51020201039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			4,800,000					4,800,000					1.00					
51108	Honorarium PNS	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5102	Belanja Barang dan Jasa			59,955,000					59,955,000										
5110804	Honorarium Pengelola Kegiatan	5102	Belanja Barang dan Jasa	510201	Belanja Barang			59,955,000					59,955,000										
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510201	Belanja Barang	51020101	Belanja Barang Pakai Habis		2,550,000	26,155,000				2,550,000	26,155,000										412.84
51203	Belanja Jasa Kantor	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		750,000	26,155,000				750,000	26,155,000										1643.67
5120311	Belanja Dokumentasi	51020101012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		750,000	6,000,000				750,000	6,000,000										300.00
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020101024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		300,000	1,080,000				300,000	1,080,000										80.00
5120601	Belanja cetak	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5102	Belanja Barang dan Jasa		150,000	1,675,000				150,000	1,675,000										458.33
5120602	Belanja Penggandaan	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	510201	Belanja Barang		150,000	17,400,000				150,000	17,400,000										5700.00
51211	Belanja Makanan dan Minuman	51020101058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis		1,500,000					1,500,000											
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	510202	Belanja Jasa				1,500,000	27,800,000				1,500,000	27,800,000										826.67
2.17.2.17.01.00.16.006	Peningkatan Koleksi Deposit	51020201	Belanja Jasa Kantor					24,800,000					24,800,000										
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020201003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					24,500,000	(8,723,115,536)				24,500,000	(8,481,605,656)									
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020201004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					300,000					300,000										
5120601	Belanja cetak	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3,000,000					3,000,000										
5120602	Belanja Penggandaan	51020204036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					3,000,000					3,000,000										
2.17.2.17.01.00.16.007	Inovasi Perpustakaan	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				7,800,000					7,800,000											
521	BELANJA PEGAWAI	51020205009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan																				
51108	Honorarium PNS	510204	Belanja Perjalanan Dinas					6,000,000					6,000,000										
5110804	Honorarium Pengelola Kegiatan	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6,000,000					6,000,000										
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020401003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				7,800,000	6,000,000				7,800,000	6,000,000										-61.54

51203	Belanja Jasa Kantor	2.23.02.2.0 1.08	Pengembangan Bahan Pustaka					6,150,000						6,150,000						1.00					
5120312	Belanja Dekorasi	5102	Belanja Barang dan Jasa					1,150,000						1,150,000						1.00					
5120315	Belanja kerjasama dengan mess media	510201	Belanja Barang					5,000,000						5,000,000						1.00					
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis					600,000						600,000						1.00					
5120601	Belanja cetak	510201010 024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor																						
5120602	Belanja Penggandaan	510201010 026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					600,000						600,000						1.00					
51211	Belanja Makanan dan Minuman	510201010 058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1,050,000						1,050,000						1.00					
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	510202	Belanja Jasa					1,050,000						1,050,000						1.00					
2.17.2.17.01 00.17	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					121,678,000						120,777,300						0.99					
2.17.2.17.01 00.17.001	Lomba Bercerita	510202050 009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan																						
511	BELANJA PEGAWAI	510204	Belanja Perjalanan Dinas																						
51109	Honorarium Non PNS	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																						
5110902	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan non ASN	510204010 003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																						
522	BELANJA BARANG DAN JASA	2.23.02.2.0 1.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka					241,229,898						236,217,100						0.98					
51203	Belanja Jasa Kantor	5101	Belanja Pegawai					6,960,000						5,700,000						0.82					
5120311	Belanja Dokumentasi	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6,960,000						5,700,000						0.82					
5120325	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	51010307	Belanja Honorarium					6,960,000						5,700,000						0.82					
5120326	Belanja Jasa Dekorasi	510103070 002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6,960,000						5,700,000						0.82					
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	5102	Belanja Barang dan Jasa					25,874,400						25,874,400						1.00					
5120601	Belanja cetak	510201	Belanja Barang					7,920,000						7,920,000						1.00					
5120602	Belanja Penggandaan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis					7,920,000						7,920,000						1.00					
51208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	510201010 026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7,920,000						7,920,000						1.00					
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	510202	Belanja Jasa					17,954,400						17,954,400						1.00					
51211	Belanja Makanan dan Minuman	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					17,954,400						17,954,400						1.00					
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	510202090 014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus					17,954,400						17,954,400						1.00					
51224	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instrukt ur/Moderator	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					208,395,498						204,642,700						0.98					
5122401	Belanja Tenaga Ahli	520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					208,395,498						204,642,700						0.98					
51228	Belanja Hadiah	52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					208,395,498						204,642,700						0.98					

5122801	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	520501010001	Belanja Modal Buku Umum		47,285,100		47,246,900		1,00		
5122804	Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	520501010003	Belanja Modal Buku Agama		43,284,960		43,282,700		1,00		
2.17.2.17.01.00.17.02	Pameran Pelayanan Publik Perpustakaan	520501010004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial						#DIV/0!		
511	BELANJA PEGAWAI	520501010006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam								
51109	Honorarium PNS	520501010007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis		53,285,120		49,922,900		0,94		
5110902	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan	520501010008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga		42,054,935		41,863,500		1,00		
512	BELANJA BARANG DAN JASA	520501010009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah		22,485,383		22,326,700		#DIV/0!	0,99	#DIV/0!
51203	Belanja Jasa Kantor	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		161,200,820		156,595,225		#DIV/0!	0,97	#DIV/0!
5120311	Belanja Dokumentasi	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		96,414,820		91,809,225			0,95	
5120312	Belanja Dekorasi	5102	Belanja Barang dan Jasa		96,414,820		91,809,225			0,95	
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	510201	Belanja Barang		43,414,820		41,009,225			0,94	
5120601	Belanja cetak	51020101	Belanja Barang Pakai Habis		43,414,820		41,009,225			0,94	
5120602	Belanja Penggandaan	51020101012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		3,653,020		2,105,425			0,58	
51207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51020101024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4,308,000		4,035,000			0,94	
5120703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5,099,800		4,514,800			0,89	
51208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51020101035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata								
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	510201010352	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		28,704,000		28,704,000			1,00	
51211	Belanja Makanan dan Minuman	51020101058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1,650,000		1,650,000			1,00	
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	510202	Belanja Jasa		37,000,000		34,800,000			0,94	
51228	Belanja Hadiah	51020201	Belanja Jasa Kantor		33,000,000		32,300,000			0,98	
5122802	Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	51020201003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		13,800,000		13,100,000			0,95	
2.17.2.17.01.00.01.003	Bedah Buku/Seminar	51020201004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		600,000		600,000			1,00	
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020201029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		5,100,000		5,100,000			1,00	
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	51020201037	Belanja Jasa Juri Per lomba/Pertandingan		13,500,000		13,500,000			1,00	

5120101	Belanja alat tulis kantor	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					1,000,000					1,000,000					1.00					
51203	Belanja Jasa Kantor	51020204037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					1,000,000					1,000,000					1.00					
5120310	Belanja Transportasi dan Akomodasi	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum																				
5120311	Belanja Dokumentasi	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					3,000,000					1,500,000					0.50					
5120312	Belanja Dekorasi	51020205009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					3,000,000					1,500,000					0.50					
5120325	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	510204	Belana Perjalanan Dinas					1,250,000					1,250,000					1.00					
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1,250,000					1,250,000					1.00					
5120601	Belanja cetak	51020401003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1,250,000					1,250,000					1.00					
5120602	Belanja Penggandaan	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					14,750,000					14,750,000					1.00					
52211	Belanja Makanan dan Minuman	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					14,750,000					14,750,000					1.00					
5221104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51020501001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					14,750,000					14,750,000					1.00					
51224	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					64,786,000					64,786,000					1.00					
5122402	Belanja Narasumber	5102	Belanja Barang dan Jasa					64,786,000					64,786,000					1.00					
5122404	Belanja Moderator	510201	Belanja Barang					21,786,000					21,786,000					1.00					
2.17.2.17.01.00.01.17.005	Workshop Petugas Perpustakaan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis			82,160,000		21,786,000			82,159,500		21,786,000					1.00	1.00				-86.74
511	BELANJA PEGAWAI	51020101012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			700,000		2,000,000			700,000		2,000,000					1.00	1.00				42.86
51109	Honorarium Non PNS	51020101024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			700,000		1,316,000			700,000		1,316,000					1.00	1.00				-6.00
5110902	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan non ASN	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			700,000		3,720,000			700,000		3,720,000					1.00	1.00				165.71
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			81,460,000		4,500,000			81,459,500		4,500,000					1.00	1.00				-97.24
51201	Belanja Bahan Pakai Habis	51020101058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Larangan			3,000,000		10,250,000			3,000,000		10,250,000					1.00	1.00				70.83
5120101	Belanja alat tulis kantor	510202	Belanja Jasa			3,000,000		25,000,000			3,000,000		25,000,000					1.00	1.00				316.67
51203	Belanja Jasa Kantor	51020201	Belanja Jasa Kantor			19,650,000		15,000,000			19,649,500		15,000,000					1.00	1.00				-61.83
5120310	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51020201003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			18,000,000					18,000,000							1.00					
5120311	Belanja Dokumentasi	51020201037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			350,000		15,000,000			350,000		15,000,000					1.00	1.00				2042.86
5120312	Belanja Dekorasi	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			500,000		10,000,000			499,500		10,000,000					1.00	1.00				901.00
5120325	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	51020204036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			800,000		10,000,000			800,000		10,000,000					1.00	1.00				525.00

51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				2,610,000	18,000,000				2,610,000	18,000,000				1.00	1.00			244.83	
5120601	Belanja cetak	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				1,200,000	18,000,000				1,200,000	18,000,000				1.00	1.00			650.00	
510602	Belanja Penggandaan	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan				1,410,000	18,000,000				1,410,000	18,000,000				1.00	1.00			538.30	
51208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				6,000,000	101,269,800				6,000,000	100,791,424				1.00	1.00			739.93	
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				6,000,000	7,789,800				6,000,000	7,789,800				1.00	1.00			-35.09	
51211	Belanja Makanan dan Minuman	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				26,500,000	5,649,800				26,500,000	5,649,800				1.00	1.00			-89.34	
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5102	Belanja Barang dan Jasa				26,500,000	5,649,800				26,500,000	5,649,800				1.00	1.00			-89.34	
51224	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	510201	Belanja Barang				23,700,000	5,349,800				23,700,000	5,349,800				1.00	1.00			-88.71	
5122402	Belanja Narasumber	51020101	Belanja Barang Pakai Habis				21,600,000	5,349,800				21,600,000	5,349,800				1.00	1.00			-87.62	
5122404	Belanja Moderator	51020101012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				2,100,000					2,100,000					1.00					
2.17.2.17.01.00.17.006	Peningkatan Kualitas Perpustakaan	51020101024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					250,000					250,000					1.00				
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					774,800					774,800					1.00				
51203	Belanja Jasa Kantor	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1,000,000					1,000,000					1.00				
5120311	Belanja Dokumentasi	51020101053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu																			
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020101058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3,325,000					3,325,000					1.00				
5120601	Belanja cetak	510202	Belanja Jasa					300,000					300,000					1.00				
5120602	Belanja Penggandaan	51020201	Belanja Jasa Kantor					300,000					300,000					1.00				
51211	Belanja Makanan dan Minuman	51020201003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia																			
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51020201004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					300,000					300,000					1.00				
51215	Belanja Perjalanan Dinas	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin																			
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51020204036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang																			
2.17.2.17.01.00.17.007	Lomba Perpustakaan Umum Kelurahan	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				22,950,000					22,949,800						1.00				
511	BELANJA PEGAWAI	51020205009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan																			
51108	Honorarium PNS	510204	Belanja Perjalanan Dinas																			
5110801	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri																			
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020401001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				22,950,000					22,949,800						1.00				

51203	Belanja Jasa Kantor	2.24.02.2.0 1.02	Peneliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				7,500,000	2,140,000			7,500,000	2,140,000			1.00	1.00			
5120311	Belanja Dokumentasi	5102	Belanja Barang dan Jasa					2,140,000				2,140,000				1.00			
5120325	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	510201	Belanja Barang				7,500,000	1,840,000			7,500,000	1,840,000			1.00	1.00			-87.73
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis				950,000	1,840,000			949,800	1,840,000			1.00	1.00			-3.14
5120601	Belanja cetak	510201010 024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				450,000	180,000			450,000	180,000			1.00	1.00			-80.00
5120602	Belanja Penggandaan	510201010 026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				500,000	560,000			499,800	560,000			1.00	1.00			-43.98
51208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	510201010 052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2,000,000	1,100,000			2,000,000	1,100,000			1.00	1.00			-72.50
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	510201010 058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				2,000,000				2,000,000				1.00				
51211	Belanja Makanan dan Minuman	510202	Belanja Jasa				2,500,000	300,000			2,500,000	300,000			1.00	1.00			-94.00
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51020201	Belanja Jasa Kantor				2,500,000	300,000			2,500,000	300,000			1.00	1.00			-94.00
51215	Belanja Perjalanan Dinas	510202010 004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					300,000				300,000				1.00			
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.24.02.2.0 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota					58,630,000				58,151,624				0.99			
51228	Belanja Hadiah	2.24.02.2.0 2.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				10,000,000	58,630,000			10,000,000	58,151,624			1.00	0.99			190.76
5122801	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	5101	Belanja Pegawai				9,000,000	1,930,000			9,000,000	1,510,000			1.00	0.78			-91.61
5122802	Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				1,000,000	1,930,000			1,000,000	1,510,000			1.00	0.78			-24.50
2.17.2.17.01 .00.01.17.00 8	Pameran dan Bazar Buku	51010307	Belanja Honorarium					1,930,000				1,510,000				0.78			
511	BELANJA PEGAWAI	510103070 002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1,930,000				1,510,000				0.78			
51109	Honorarium Non PNS	5102	Belanja Barang dan Jasa					56,700,000				56,641,624				1.00			
5110902	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan non ASN	510202	Belanja Jasa					56,700,000				56,641,624				1.00			
512	BELANJA BARANG DAN JASA	51020201	Belanja Jasa Kantor					56,700,000				56,641,624				1.00			
51203	Belanja Jasa Kantor	510202010 052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Pungas					56,700,000				56,641,624				1.00			
5120311	Belanja Dokumentasi	2.24.02.2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota					34,850,000				34,850,000				1.00			
5120312	Belanja Dekorasi	2.24.02.2.0 3.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN					34,850,000				34,850,000				1.00			

5120325	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	5102	Belanja Barang dan Jasa						34,850.000						34,850.000					1.00							
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	510201	Belanja Barang						4,800.000						4,800.000					1.00							
5120602	Belanja Penggandaan	51020101	Belanja Barang Pakai Habis						4,800.000						4,800.000					1.00							
51208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51020101024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						250.000						250.000					1.00							
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	51020101026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak						1,495.000						1,495.000					1.00							
51210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51020101052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						1,100.000						1,100.000					1.00							
5121005	Belanja sewa tenda	51020101058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						1,955.000						1,955.000					1.00							
51211	Belanja Makanan dan Minuman	510202	Belanja Jasa						15,300.000						15,300.000					1.00							
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51020201	Belanja Jasa Kantor						15,300.000						15,300.000					1.00							
2.17.2.17.01.00.01.17.009	Pelatihan Mendongeng	51020201004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan						300.000						300.000					1.00							
511	BELANJA PEGAWAI	51020201037	Belanja Jasa Juri Perkiraan/Pertandingan						15,000.000						15,000.000					1.00							
51108	Honorarium PNS	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin																	#DIV/0!							
5110801	Honorarium panitia / tim pelaksana kegiatan	51020204037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang																	#DIV/0!							
512	BELANJA BARANG DAN JASA	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						14,750.000						14,750.000					1.00							
51203	Belanja Jasa Kantor	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat						14,750.000						14,750.000					1.00							
5120310	Belanja Transportasi dan Akomodasi	51020501001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan						14,750.000						14,750.000					1.00							
5120311	Belanja Dokumentasi	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																								
5120312	Belanja Dekorasi	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota																								
5120325	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																								
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan	5102	Belanja Barang dan Jasa																								
5120601	Belanja cetak	510202	Belanja Jasa																								
5120602	Belanja Penggandaan	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi																								
51211	Belanja Makanan dan Minuman	51020209014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus																								
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan																										

5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan					1,800,000									1,800,000							1.00				
2.18.2.17.01.00.19.006	Lomba Karya Tulis Kearsipan					350,000									350,000								1.00			
511	BELANJA PEGAWAI																									
51109	Honorarium Non PNS																									
5110902	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN																									
512	BELANJA BARANG DAN JASA					350,000									350,000								1.00			
51211	Belanja Makanan dan Minuman					350,000									350,000								1.00			
5121104	Belanja makanan dan minuman kegiatan					350,000									350,000								1.00			
2.18.2.17.01.00.20	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH					3,250,000									3,250,000								1.00			
2.18.2.17.01.00.20.003	Alih Media					3,250,000									3,250,000								1.00			
511	BELANJA PEGAWAI					1,050,000									1,050,000								1.00			
51109	Honorarium Non PNS					1,050,000									1,050,000								1.00			
5110902	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN					1,050,000									1,050,000								1.00			
512	BELANJA BARANG DAN JASA					2,200,000									2,200,000								100.00			
51203	Belanja Jasa Kantor					250,000									250,000								100.00			
5120311	Belanja Dokumentasi					250,000									250,000								100.00			
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan					550,000									550,000								100.00			
5120601	Belanja cetak					250,000									250,000								100.00			
5120602	Belanja Penggandaan					300,000									300,000								100.00			
52211	Belanja Makanan dan Minuman					1,400,000									1,400,000								100.00			
5221105	Belanja makanan dan minuman kegiatan					1,400,000									1,400,000								100.00			
2.18.2.17.01.00.21	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN					13,400,000									12,953,500								96.67			
2.18.2.17.01.00.21.001	Database Kearsipan Secara Elektronik/Digital					6,900,000									6,500,000								94.20			
512	BELANJA BARANG DAN JASA					6,900,000									6,500,000								94.20			
51219	Belanja Jasa Konsultasi					6,900,000									6,500,000								94.20			
5121904	Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Komputerisasi					6,900,000									6,500,000								94.20			
2.18.2.17.01.00.21.002	Pemutakhiran Arsip Statis					6,500,000									6,453,500								99.28			
511	BELANJA PEGAWAI					1,050,000									1,050,000								100.00			
51109	Honorarium Non PNS					1,050,000									1,050,000								100.00			
5110902	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN					1,050,000									1,050,000								100.00			
512	BELANJA BARANG DAN JASA					5,450,000									5,403,500								99.15			
51203	Belanja Jasa Kantor					750,000									720,000								96.00			
5120311	Belanja Dokumentasi					250,000									240,000								96.00			
5120312	Belanja Dekorasi					500,000									480,000								96.00			

51206	Belanja Cetak dan Penggandaan						3,300,000					3,283,500					99.50				
5120601	Belanja cetak						3,000,000					2,983,500					99.45				
5120602	Belanja Penggandaan						300,000					300,000					100.00				
52211	Belanja Makanan dan Minuman						1,400,000					1,400,000					100.00				
5221105	Belanja makanan dan minuman kegiatan						1,400,000					1,400,000					100.00				

2.3. Kelompok Sasaran Layanan

2.3.1. Layanan Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan pada Pasal 9 ayat tiga (3) dinyatakan bahwa; ” Yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman bacaan dan/atau sudut baca adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum di daerah.

Tempat dan/atau fasilitas umum dimaksud antara lain meliputi :

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. hotel dan Lembaga Pemasyarakatan; dan
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum

Mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa Pelayanan Perpustakaan yakni:

- a. Jam buka perpustakaan yaitu Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 7 (tujuh) jam per hari kerja;
- b. Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit meliputi:
 1. pelayanan sirkulasi;
 2. pelayanan referensi; dan
 3. pelayanan literasi informasi.
- c. program wajib baca di perpustakaan;
- d. perpustakaan memiliki program pendidikan pemustaka paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- d. perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit 3 (tiga) kali setahun untuk setiap tingkatan kelas;
- e. perpustakaan melakukan promosi paling sedikit dalam bentuk:
 1. brosur/*leaflet*/selebaran;
 2. majalah dinding/perpustakaan;
 3. daftar buku baru;
 4. display koleksi perpustakaan; dan
 5. lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan.

- f. perpustakaan membuat laporan kegiatan pelayanan perpustakaan (statistik) paling sedikit berupa laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas.
- g. perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerja sama dengan:
 - 1. perpustakaan sekolah lain;
 - 2. perpustakaan umum;
 - 3. organisasi profesi kepustakawanan/forum perpustakaan; dan
 - 4. yayasan dan/atau lembaga korporasi.
- i. perpustakaan melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah meliputi:
 - 1. kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui:
 - a) lomba sinopsis;
 - b) gelar wicara (talk show) tentang buku; dan
 - c) lomba mengarang berbagai bentuk tulisan (puisi, prosa, esai).
 - 2. pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan;
 - 3. pengajaran program literasi informasi;
 - 4. terlibat dalam merencanakan perangkat pembelajaran;
 - 5. membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik;
 - 6. menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik;
 - 7. membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran; dan
 - 8. membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran.

2.3.2. Layanan Kearsipan

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dinyatakan bahwa dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu, perlu dibangun sistem kearsipan daerah meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis.

Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Daerah sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem penyelenggaraan kearsipan nasional akan dapat berjalan secara efektif apabila lembaga kearsipan kabupaten/kota didukung oleh suatu Sistem Informasi Kearsipan

Daerah dalam kerangka sistem kearsipan yang berfungsi untuk menyajikan informasi yang autentik, utuh dan terpercaya serta mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen.

Untuk mewujudkan Sistem Informasi Kearsipan Daerah agar dapat berjalan secara optimal, maka Lembaga Kearsipan Daerah perlu membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagai pusat jaringan daerah serta lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan informasi kearsipan daerah pada lembaga-lembaga kearsipan, yang berfungsi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta masyarakat di bidang kearsipan.

Sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa, sehingga mampu merespon tuntutan dinamika gerak maju masyarakat dan pemerintah daerah ke depan.

Standar Pelayanan Kearsipan masih mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Pontianak Nomor 05/DISTAKA/TAhun 2021, meliputi:

1. Pelayanan Peminjaman Arsip.
2. Pelayanan Pemanfaatan dan Penggunaan Arsip Statis.
3. Pelayanan Pemanfaatan dan Penggunaan Arsip Dinamis.
4. Pelayanan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Dinas Perpustakaan Kota Pontianak.
5. Pelayanan Pembinaan Kearsipan.
6. Pelayanan Arsip Keluarga.
7. Pelayanan Pengaduan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat, perpustakaan memiliki peran penting untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan bangsa. Di dalam amanat Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat tertuang amanah bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk menjadikan masyarakat cerdas, sejahtera, bersatu, dan ikut menjaga perdamaian dunia, maka perpustakaan sebagai penggerak utama (*prime mover*) merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pembangunan di Indonesia.

Diperlukan proses transformasi kelembagaan yang memberdayakan masyarakat dan menyelenggarakan layanan prima dengan keunggulan informasi yang bernilai tinggi, bermanfaat secara sosial, dan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Idealnya perpustakaan, khususnya perpustakaan harus mampu merespons dan beradaptasi terhadap dinamika lembaga induknya dalam meningkatkan eksistensi dan peran dalam organisasi.

Perpustakaan bukan lagi mengenai satu buku untuk satu orang, tetapi bagaimana merubah masyarakat menjadi produsen. Era digital dewasa ini telah merubah perilaku pemustaka di dalam perilaku pencarian informasi (*information seeking behavior*) di perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan tidak lagi menjadi ukuran di dalam kinerja layanan perpustakaan, melainkan kunjungan secara daring

Membaca adalah merupakan syarat utamanya. Perpustakaan mempunyai peran sangat strategis yaitu sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, serta merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yaitu sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 209 dan pasal 212, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 40 ayat 4 menyebutkan Perumpunan Urusan Pemerintahan meliputi perpustakaan dan kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak merupakan perangkat daerah Pemerintah Kota Pontianak yang membantu pelaksanaan tugas Walikota Pontianak yang menangani urusan perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi dan tugas Meningkatkan pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan serta meningkatkan pengelolaan arsip daerah.

Dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pendampingan serta pemantaun dalam pengelolaan perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak melakukan identifikasi permasalahan yaitu

1) Permasalahan Bidang Urusan Perpustakaan, diantaranya:

- a. Masih rendahnya Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dimana Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pontianak Tahun 2022 baru mencapai 51,82. Hal ini dikarenakan Belum meratanya Layanan Perpustakaan (UPLM 1), Terbatasnya koleksi buku pada perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan kelurahan/ kecamatan (UPLM 2), Masih kurangnya jumlah Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3),
- b. Kota Pontianak mendapatkan program Transportasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada pertengahan Tahun 2022 dan belum tersosialisasinya Program Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tersebut secara maksimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat masih menganggap Perpustakaan hanya sebagai tempat membaca dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sebagai leading sektor pemerintah Kota Pontianak belum optimal dalam menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam rangka mewujudkan transpormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;

2) Permasalahan Bidang Urusan Kearsipan

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban bagi kegiatan pemerintah.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip juga merupakan data atau dokumen dalam bentuk apapun yang memiliki nilai historis, nilai hukum dan nilai kegunaan yang disimpan secara teratur dan sistematis agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat apabila diperlukan oleh suatu lembaga atau organisasi.

Standar penyimpanan fisik arsip yaitu dapat menjamin dan meningkatkan kualitas penyimpanan arsip, kapasitas ruang simpan arsip inaktif pada dasarnya sangat tergantung pada kondisi dan kemampuan instansi, penyimpanan dapat menggunakan rak konvensional (rak status, stationary stacks), dan dengan rak yang padat (compact, sheffing, roll o'pact, mobile stacks, rak bergerak).

Standar suhu dan kelembaban ruang simpan arsip tidak lebih dari 20 C dan kelembaban tidak lebih dari 50 %, dan kondisi lingkungan Tempat penyimpanan arsip jauh dari lokasi yang berbahaya, sesuai dengan retensi / jangka waktu simpan arsip, pencahayaan langsung terhadap arsip dihindarkan

Berdasarkan identifikasi permasalahan kearsipan di Kota Pontianak saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah belum memahami pengelolaan arsip dinamis yang harus dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit kearsipan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Pontianak, sehingga Nilai Indeks Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2022 memperoleh nilai C (kurang). Hal ini dikarenakan OPD belum melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik, belum melakukan pemeliharaan arsip yaitu menyusun daftar arsip; penyusutan arsip yang terdiri dari pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan daerah dan belum menggunakan sarana prasarana kearsipan yang sesuai dengan ketentuan
- b. Gedung LKD belum sesuai standar sehingga layanan belum optimal, sehingga Standarisasi gedung Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan bangunan Lembaga Kearsipan Daerah LKD masih menyatu dengan Gedung Layanan Perpustakaan sehingga tidak dapat optimal dalam melengkapi sarana dan prasarana penunjang LKD.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pontianak Tahun 2022 sebesar 51,82	Masih rendahnya Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	-Belum meratanya Layanan Perpustakaan (UPLM 1)
			-Terbatasnya koleksi buku pada perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat, perpustakaan kelurahan/ kecamatan (UPLM 2)
			-Masih kurangnya jumlah Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)
2	Belum tersosialisasinya Program Transpormasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Kota Pontianak mendapatkan program Transportasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada pertengahan Tahun 2022	-Sebagian besar masyarakat masih menganggap Perpustakaan hanya sebagai tempat membaca.
			-Disperpusip belum menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam mewujudkan transpormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
3	Nilai Indeks Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2022 C (kurang)	Perangkat Daerah belum memahami pengelolaan arsip dinamis yang harus dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit kearsipan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Pontianak	OPD belum melaksanakan pengelolaan arsip :
			a.pemeliharaan arsip yaitu menyusun daftar arsip;
			b.penyusutan arsip yang terdiri dari pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan daerah;
			c.belum menggunakan sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan ketentuan
4	Standarisasi gedung Lembaga Kearsipan Daerah (LKD)	Gedung LKD belum sesuai standar sehingga layanan belum optimal	Bangunan LKD masih menyatu dengan Gedung Layanan Perpustakaan sehingga tidak dapat optimal dalam melengkapi sarana dan prasarana penunjang LKD.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis sesuai Tugas Pokok Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Ringkasan Isus-Isu dari Tugas Fungsi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
Tahun 2022

Faktor Yang ditinjau	Uraian	Isu-Isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Tugas Pokok: membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.	<ol style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan belum optimal. b. Pelayanan perpustakaan dan kearsipan belum optimal. c. Manajemen kearsipan (pengelolaan arsip dan digitalisasi arsip) belum optimal
Sasaran jangka menengah ANRI	Sasaran jangka menengah ANRI yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Kearsipan. b. B.Pengelolaan Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan arsip melalui digitalisasi arsip belum optimal. 2. Jumlah dan kompetensi arsiparis belum optimal.
Sasaran Jangka menengah Perpustakaan RI.	Sasaran jangka menengah PERPUSNAS RI yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan budaya gemar membaca; b. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses maupun utilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dan jangkauan layanan perpustakaan masih terbatas. 2. Terbatasnya akses perpustakaan digital ke masyarakat. 3. Jumlah dan kompetensi pustakawan belum memadai.
Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan 2. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah 	Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat 2. Indeks kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perentase kunjungan ke perpustakaan dan tempat baca, 2. Ketercukupan koleksi Perpustakaan 3. Ketercukupan tenaga perpustakaan 4. Tingkat Ketersediaan Arsip 5. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi menuju kualitas kondusivitas daerah menuju Good Government. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Pontianak tahun 2024-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dituntut lebih humanis, antisipasi, responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan – perubahan baik ditingkat local, regional dan nasional.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis, sebagai berikut:

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan; dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perpustakaan.
- b. Lokas perpustakaan dan depo arsip daerah yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.
- c. Dukungan anggaran dari Pemerintah kota Pontianak.

2. Kelemahan Internal

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dengan keahlian: Pustakawan; Tenaga IT perpustakaan; Arsiparis, Tenaga IT Kearsipan.
- b. Ketersediaan ASN Pustakawan dan Arsiparis.
- c. Kapasitas dan kualitas Gedung Layanan Perpustakaan dan depo arsip yang belum memadai.
- d. Belum efektifnya system data dan informasi yang akurat dan terintegrasi.

3. Tantangan/Ancaman Eksternal

- a. Adanya tuntutan dari Perpustakaan RI tentang penerapan program Indonesia Gemar Membaca, transformasi digital.
- b. Adanya tuntutan dari ANRI supaya daerah membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menuntut daerah untuk memberikan pelayanan dan informasi berbasis teknologi dan informasi.

4. Peluang Eksternal

- a. Adanya penawaran Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan.

Dari kajian tersebut di atas, isu – isu strategis yang akan menjadi tantangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan di bidang perpustakaan dan di bidang Kearsipan.
2. Pembinaan kepada Perpustakaan di Kota Pontianak.
3. Pendampingan terhadap Perangkat Daerah untuk menerapkan pengelolaan arsip.
4. Peningkatan kualitas dan jangkauan akses layanan perpustakaan dan kearsipan yaitu akses internet untuk mendukung perkembangan teknologi digital, optimalisasi sarana prasarana perpustakaan digital, dan optimalisasi sarana prasarana digitalisasi arsip.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah tahap perumusan sasaran startegis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama Tiga tahun.

- Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan memperjelas yang ingin dicapai.

Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak 2024-2026 adalah sesuai dengan **Sasaran RPJMD Kota Pontianak nomor 13 yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**

- Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dalam jangka waktu satu tahun, sampai lima tahun mendatang. Sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak adalah:

- **Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan;**
Dengan indikatornya Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
- **Meningkatnya pengelolaan arsip daerah;**
Dengan indikatornya Indeks Kearsipan.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan startegis yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA/ CARA PENGUKURAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Pelayanan Publik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan	Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	= jumlah kunjungan ke Perpustakaan paling sedikit 0.10 per kapita per tahun	85%	85%	85%
		Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	Indeks Kearsipan	= (60% x nilai pengawasan eksternal) + (40% x nilai pengawasan internal)	CC (cukup)	CC (cukup)	B (baik)

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)										
	1 Meningkatkan pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan	Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat										
			1 Program Pembinaan Perpustakaan	Terwujudnya Pembinaan Perpustakaan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan	Ketercukupan koleksi Perpustakaan Ketercukupan tenaga perpustakaan							
						1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terwujudnya perpustakaan yang dikelola dengan baik	Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota	1.1.1 Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	Bidang Perpustakaan
									1.1.2 Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
									1.1.3 Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Perpustakaan
									1.1.4 Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
						1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Terwujudnya Pembudayaan Gemar Membaca yang Baik	Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota	1.2.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Bidang Perpustakaan
									1.2.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Bidang Perpustakaan

2 Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah	Indeks Kearsipan	2 Program Pengelolaan Arsip	Terwujudnya pengelolaan arsip yang baik	Tingkat Ketersediaan Arsip	2.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis daerah yang baik pada perangkat daerah, kelurahan dan ormas	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada perangkat daerah	1.2.3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Bidang Perpustakaan						
								2.1.1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Bidang Kearsipan						
												2.1.2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Bidang Kearsipan		
																2.1.3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota
								2.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Terwujudnya pengelolaan arsip statis daerah yang baik	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	2.2.1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Bidang Kearsipan			
											2.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kab/Kota	Terwujudnya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kab/ kota yang baik	Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak	2.3.1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN	Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bidang Kearsipan
														3.1. Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yg dimusnahkan dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	3.1.1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang dimiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
								3.1.2. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang dimiliki Retensi dibawah 10 tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang dimiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Bidang Kearsipan						
								3.2. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alihmedia Kab/Kota	Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alihmedia Kab/Kota	Jumlah Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota	3.2.1. Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip.	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip.	Jumlah Daftar Autentikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				Bidang Kearsipan
											3.2.2. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Bidang Kearsipan			

				3.3. Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang	Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang	3.3.1. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang.	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang.	Jumlah Daftar Autentifikasi Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Bidang Kearsipan
							3.3.2. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Bidang Kearsipan
							3.3.3. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	
	4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	4.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
							4.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sekretaris Dinas
							4.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretaris Dinas
							4.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris Dinas
				4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	4.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretaris Dinas
							4.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretaris Dinas
							4.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretaris Dinas

4.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	4.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Sekretaris Dinas
			4.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Dinas
4.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	4.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretaris Dinas
			4.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretaris Dinas
			4.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sekretaris Dinas
			4.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	Sekretaris Dinas
			4.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	Sekretaris Dinas
			4.4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sekretaris Dinas
			4.4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretaris Dinas
			4.5. Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4.5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretaris Dinas
			4.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretaris Dinas
			4.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretaris Dinas
			4.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretaris Dinas
4.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekretaris Dinas
			4.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretaris Dinas
			4.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretaris Dinas

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Perumusan Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Pontianak dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1 Meningkatkan pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan	1.1. Penguatan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan 1.2. Pembinaan kepada Perpustakaan di Kota Pontianak	1.1.1. Meningkatkan mutu pembinaan dan pendampingan kepada perpustakaan di Kota Pontianak
	2 Meningkatkan pengelolaan arsip daerah	2.1. Pendampingan terhadap Perangkat Daerah untuk menerapkan pengelolaan arsip 2.2. Peningkatan kualitas dan jangkauan akses layanan perpustakaan dan kearsipan yaitu akses internet untuk mendukung perkembangan teknologi digital, optimalisasi sarana prasarana perpustakaan digital, dan optimalisasi sarana prasarana digitalisasi arsip	2.1.1. Meningkatkan mutu pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program yang dimaksud adalah sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Periode 2024-2026. Dalam implementasinya tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya sehingga perlu adanya review Rencana Strategi oleh manajemen puncak serta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui review Renstra menunjukkan tingginya komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program kegiatan serta anggarannya.

Rencana Program, kegiatan dan Pendanaan tersebut mencakupi Program, Kegiatan dan pendanaan setiap urusan serta Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak maka rencana program, kegiatan, dan pendanaan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1

Tabel T-C.27.

Tabel VI. 1

Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kota Pontianak
	Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca dan Pembinaan Perpustakaan	2.23		Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	249%	85%		85%		85%		85%		Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.23.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95%	7,600,630,600	95%	7,835,603,600	95%	7,861,782,600	95%	23,298,016,800	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100%	33,400,000	100%	33,400,000	100%	33,400,000	100%	100,200,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 dokumen	14,400,000	8 dokumen	14,400,000	8 dokumen	14,400,000	24 dokumen	43,200,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	5,500,000	3 dokumen	16,500,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak

		2.23.1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	5,500,000	3 dokumen	16,500,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19 Laporan	8,000,000	19 Laporan	8,000,000	19 Laporan	8,000,000	19 Laporan	24,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	6,400,341,000	100%	6,436,809,000	100%	6,489,493,000	100%	19,326,643,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang	6,233,981,000	43 Orang	6,270,449,000	43 Orang	6,323,133,000	43 Orang	18,827,563,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	156,360,000	1 Dokumen	156,360,000	1 Dokumen	156,360,000	1 Dokumen	469,080,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.2.3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		7 Dokumen	10,000,000	7 Dokumen	10,000,000	7 Dokumen	10,000,000	21 Dokumen	30,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	87,510,000	100%	87,510,000	100%	87,510,000	100%	262,530,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 paket	57,510,000	2 paket	57,510,000	2 paket	57,510,000	6 paket	172,530,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	30,000,000	5 Orang	30,000,000	5 Orang	30,000,000	15 Orang	90,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	243,476,200	100%	243,476,200	100%	243,476,200	100%	730,428,600	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak

		2.23.1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	14,008,200	1 Paket	14,008,200	1 Paket	14,008,200	3 Paket	42,024,600	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	50,339,200	1 Paket	50,339,200	1 Paket	50,339,200	3 Paket	151,017,600	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	20,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	3 Paket	80,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.4.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	3 Paket	120,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.4.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	46,128,800	1 Paket	46,128,800	1 Paket	46,128,800	3 Paket	138,386,400	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.4.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Paket	13,000,000	1 Paket	13,000,000	1 Paket	13,000,000	3 Paket	39,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6 Laporan	60,000,000	6 Laporan	50,000,000	6 Laporan	50,000,000	18 Laporan	160,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	550,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.5.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		56 Unit	150,000,000	56 Unit	200,000,000	56 Unit	200,000,000	168 Unit	550,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	403,363,600	100%	585,584,400	100%	585,584,400	100%	1,574,532,400	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1,200,000	1 Laporan	1,200,000	1 Laporan	1,200,000	1 Laporan	3,600,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak

		2.23.1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	225,000,000	4 Laporan	250,000,000	4 Laporan	250,000,000	4 Laporan	725,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.6.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	30,000,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.6.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	167,163,600	5 Laporan	324,384,400	5 Laporan	324,384,400	5 Laporan	815,932,400	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100%	282,539,800	100%	248,824,000	100%	222,319,000	100%	753,682,800	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit	140,320,000	5 Unit	140,320,000	5 Unit	140,320,000	5 Unit	420,960,000	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		72 Unit	65,297,350	72 Unit	65,297,350	72 Unit	65,297,350	72 Unit	195,892,050	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.1.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	76,922,450	2 Unit	43,206,650	2 Unit	16,701,650	2 Unit	136,830,750	Sekretaris Dinas	Kota Pontianak
		2.23.2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Ketercukupan koleksi Perpustakaan	73.155 eksemplar	150 judul (300 eksemplar)	11,755,319,400	150 judul (300 eksemplar)	717,814,400	150 judul (300 eksemplar)	755,319,400	150 judul (300 eksemplar)	13,228,453,200	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
				Ketercukupan tenaga perpustakaan	25.10%	36.30%		47.50%		58.70%		58.70%		Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak

		2.23.2.1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota	100%	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	1,500,000,000	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
		2.23.2.1.2.	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		6 Perpustakaan	219,069,400	6 Perpustakaan	219,069,400	6 Perpustakaan	219,069,400	18 Perpustakaan	657,208,200	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
		2.23.2.1.3.	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		6 Perpustakaan	134,680,600	6 Perpustakaan	134,680,600	6 Perpustakaan	134,680,600	18 Perpustakaan	404,041,800	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
		2.23.2.1.5.	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 orang	40	50,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	120	150,000,000	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
		2.23.2.1.6.	Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi		300 eksemplar	96,250,000	300 eksemplar	96,250,000	300 eksemplar	96,250,000	900 eksemplar	288,750,000	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
		2.23.2.2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota	100%	100%	11,255,319,400	100%	217,814,400	100%	255,319,400	100%	11,728,453,200	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
		2.23.2.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		6 Lokus	105,319,400	6 Lokus	105,319,400	6 Lokus	105,319,400	6 Lokus	315,958,200	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak

		2.23.2.2.2.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Rumah Baca	1 Perpustakaan	11,000,000,000	1 Perpustakaan	0.00	1 Perpustakaan	0.00	11,000,000,000	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak	
		2.23.2.2.3.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		6 Orang	150,000,000	6 Orang	112,495,000	6 Orang	150,000,000	18 Orang	412,495,000	Bidang Perpustakaan	Kota Pontianak
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	2.24.		<i>Indeks Kearsipan</i>	<i>C (Kurang)</i>	<i>CC (Cukup)</i>		<i>CC (Cukup)</i>		<i>B (Baik)</i>		<i>B (Baik)</i>	-	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.	Program Pengelolaan Arsip	<i>Tingkat Ketersediaan Arsip</i>		74%	291,000,000	75%	292,600,000	76%	292,600,000	76%	876,200,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	<i>Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada perangkat daerah, kelurahan, dan ormas</i>		32%	177,000,000	34%	178,600,000	34%	178,600,000	100%	534,200,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.1.1.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		20 Berkas	85,000,000	21 Berkas	85,000,000	21 Berkas	85,000,000	62 Berkas	255,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.1.2.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		20 Berkas	32,000,000	21 Berkas	33,600,000	21 Berkas	33,600,000	62 Berkas	99,200,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.1.3.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Laporan	60,000,000	10 Laporan	60,000,000	10 Laporan	60,000,000	30 Laporan	180,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.2.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	<i>Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota</i>		100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000	100%	330,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.2.1.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100%	5000 Arsip	110,000,000	5000 Arsip	110,000,000	5000 Arsip	110,000,000	15.000 Arsip	330,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak

		2.24.2.3.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak	100%	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	12,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.2.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100%	10 Pengguna	4,000,000	10 Pengguna	4,000,000	10 Pengguna	4,000,000	30 Pengguna	12,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban		50%	28,000,000	60%	28,000,000	70%	28,000,000	70%	84,000,000		
		2.24.3.1.	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Persentase Arsip yg dimusnahkan dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	100%	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	11,000,000	100%	33,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.1.1.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang dimiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		300 Arsip	6,000,000	300 Arsip	6,000,000	300 Arsip	6,000,000	900 Arsip	18,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.1.2.	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang dimiliki Retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		6 Berkas	5,000,000	6 Berkas	5,000,000	6 Berkas	5,000,000	18 Berkas	15,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.2.	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alihmedia Kab/Kota	Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota	100%	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	6,500,000	100%	19,500,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.2.1.	Penilaian dan Penetapan/Autentikasi Arsip Statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan Arsip.	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		1 Arsip	2,000,000	1 Arsip	2,000,000	1 Arsip	2,000,000	3 Arsip	6,000,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak

		2.24.3.2.2.	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		1 Arsip	4,500,000	1 Arsip	4,500,000	1 Arsip	4,500,000	3 Arsip	13,500,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.3	Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang	Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang	100%	100%	10,500,000	100%	10,500,000	100%	10,500,000	100%	31,500,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.3.1.	Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang.	Jumlah Daftar Autentifikasi Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan		1 Arsip	3,500,000	1 Arsip	3,500,000	1 Arsip	3,500,000	3 Arsip	10,500,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.3.2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang		1 Arsip	3,500,000	1 Arsip	3,500,000	1 Arsip	3,500,000	3 Arsip	10,500,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak
		2.24.3.3.3.	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		1 Arsip	3,500,000	1 Arsip	3,500,000	1 Arsip	3,500,000	3 Arsip	10,500,000	Bidang Pengelolaan Kearsipan	Kota Pontianak

Pagu Renstra	19,674,950,000	8,874,018,000	8,937,702,000	
Pagu Indikatif	19,674,950,000	8,874,018,000	8,937,702,000	37,486,670,000
Selisih	0.00	0.00	0.00	

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 terdapat 4 Program yang terdiri dari Program Penuinjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat 7 kegiatan yang terdiri dari:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Pembinaan Perpustakaan terdapat 2 kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Pada program Pengelolaan Arsip terdapat 3 kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota, dan
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten/ Kota

Pada program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terdapat 3 kegiatan yang terdiri dari:

1. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemda Kabupaten/ Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 tahun;
2. Autentifikasi Arsip statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota; dan
3. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang.

Jadi total Jumlah **Program sebanyak 4 Program dan Kegiatan berjumlah 15 Kegiatan.**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Perumusan indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kinerja penyelenggaran bidang urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	249%	85%	85%	85%	85%
		Indeks Kearsipan	C (kurang)	CC (cukup)	CC (cukup)	B (baik)	B (baik)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun sebagai wujud pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

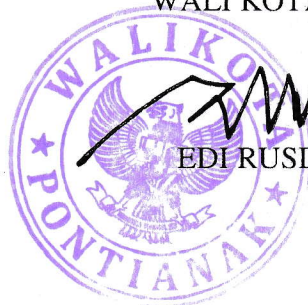
Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2020-2024 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah yang terencana, terukur dan akuntabel sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak ini akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dan menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024-2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran tahun 2024-2026 kedalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, 2025 dan 2026.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Rencana Strategis tahun 2024-2026.

WALI KOTA PONTIANAK,





EDI RUSDI KAMTONO